



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

LKIP

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Bekasi, Februari 2026
Kepala Dinas Perhubungan



Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si. M.T
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi.....	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
1.5. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II Perencanaan Kinerja	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	16
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	25
3.2.1 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
3.3. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV Penutup	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	61
Lampiran	
- Perjanjian Kinerja	
- Pengukuran Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi	7
Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bekasi.....	7
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan..	18
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025 (RPD 2024-2026).....	19
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPD 2024-2026	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPJMD 2025-2029	22
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2025	22
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 (RPD 2024-2026).....	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	26
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Rata-Rata V/C Rasio.....	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio antara Tahun 2024 dengan 2025.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Penurunan Rata-Rata V/C Rasio Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029.....	30
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	30
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	31
Tabel 3.8 Kriteria Kinerja Keuangan	32
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan.....	35
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan antara Tahun 2024 dengan 2025.....	35
Tabel 3.11 Perbandingan Akumulasi Realisasi Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029.....	36
Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran.....	37
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan.....	39
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan antara Tahun 2024 dengan 2025....	40

	Hal
Tabel 3.15 Data Sarana dan Prasarana Perhubungan.....	40
Tabel 3.16 Data Halte, Terminal Tahun 2025.....	41
Tabel 3.17 Lokasi Halte Transpatriot Tahun 2025.....	41
Tabel 3.18 Data Rambu dan Marka 2023-2025.....	42
Tabel 3.19 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan.....	43
Tabel 3.20 Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029.....	44
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional...	44
Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran.....	46
Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum.....	49
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum antara Tahun 2024 dengan 2025.....	50
Tabel 3.25 Indikator Capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum.....	51
Tabel 3.26 Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029.....	52
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional...	52
Tabel 3.28 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran.....	53
Tabel 3.29 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025.....	58
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	59

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	6
Gambar 3.1 Pengaturan Lalin Pada Simpang Kemang.....	30
Gambar 3.2 Pengaturan Lalin Pada Jalan Raya Pekayon.....	31
Gambar 3.3 Pemeliharaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas	31
Gambar 3.4 Pelaksanaan Operasi Gabungan.....	36
Gambar 3.5 Pelaksanaan MRLL di Jalan Wibawa Mukti.....	36
Gambar 3.6 Uji KIR Roda 4.....	40
Gambar 3.6 Pengoperasian Bus Kita.....	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Kota Bekasi 2025-2029 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah Meningkatkan Layanan Perhubungan.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas.

Terkait dengan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran (1), (2), (3) dan (4). Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1) adalah 1404%, Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 100%, Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (3) adalah 120%, Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (4) adalah 100%.

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selisih antara Performance Plan dengan Performance Result merupakan kesenjangan kinerja (Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan guna perbaikan di masa yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dari 2 program mencakup 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan cukup baik.

BAB



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, partisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu keharusan. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, khususnya Dinas Perhubungan, dituntut untuk senantiasa beradaptasi dan berkembang seiring dengan dinamika perubahan zaman, baik dari sisi pemikiran maupun tindakan, serta mampu mengintegrasikan diri dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan kepada Wali Kota Bekasi. Laporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, capaian kinerja yang telah dilaksanakan, serta penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan tindakan operasional yang terencana dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang perlu terus dikembangkan adalah penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pembangunan LRT/Light Rail Transit, pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api, proyek pemasangan pipa pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jalan Hasibuan Kecamatan Bekasi Timur dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kota Bekasi.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi program pembangunan bidang perhubungan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangat beragam. Melalui Dinas Perhubungan harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk mengoptimalkan pelayanan.

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi maupun sasaran yang ada pada renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang pertama adalah Persentase Penurunan rata-rata V/C Rasio. Kemacetan lalu lintas masih menjadi isu strategis. V/C Rasio (Volume per capacity ratio) merupakan indikator kinerja utama untuk menilai tingkat kepadatan lalu lintas pada ruas jalan. Penurunan rata-rata V/C Rasio menunjukkan bahwa arus lalu lintas semakin mendekati kondisi ideal dan kapasitas jalan dimanfaatkan

secara lebih efisien. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian sasaran ke I pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang kedua adalah Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan. Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan digunakan untuk mengukur tingkat keselamatan lalu lintas. Penurunan rasio fatalitas menunjukkan peningkatan kualitas keselamatan jalan melalui berbagai program, seperti peningkatan fasilitas keselamatan jalan, penataan lokasi rawan kecelakaan, serta edukasi dan penegakan disiplin berlalu lintas. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian sasaran ke I pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang ketiga adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana perhubungan dalam mendukung kelancaran, keselamatan dan keterpaduan sistem transportasi daerah. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, halte, terminal, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian sasaran ke I pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern.
4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang keempat adalah Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum. Indikator Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan dan kesiapan armada angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator ini menggambarkan proporsi jumlah armada angkutan umum yang beroperasi dibandingkan dengan total armada yang tersedia, sebagai ceminan tingkat pemenuhan pelayanan transportasi publik di daerah. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang

pencapaian sasaran ke I pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu Meningkatkan estetika kota disertai infrastruktur modern.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Tahun 2025 dimana indikator persentase penurunan rata-rata V/C rasio memperoleh capaian kinerja sebesar 1404 persen, indikator rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, indikator persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan memperoleh capaian kinerja sebesar 120 persen. Dan indikator persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen. Maka pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus bisa mempertahankan kinerja yang baik agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2025 dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 ini.

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Perhubungan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dan dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan Unsur SKPD

Pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana prasarana serta pengendalian dan operasional. Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidangnya meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana prasarana serta pengendalian dan operasional.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menerapkan budaya kerja value BerAKHLAK yang merupakan nilai dasar (core values) pada pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam bekerja.

1. Berorientasi Pelayanan

- Melayani masyarakat dengan ramah saat pengurusan uji KIR, izin trayek atau pengaduan lalu lintas.
- Respons cepat terhadap laporan kemacetan atau kecelakaan.
- Memberikan informasi yang jelas tanpa mempersulit proses.

2. Akuntabel

- Petugas bekerja sesuai SOP saat penertiban parkir atau razia kendaraan.
- Tidak menerima pungutan liar (pungli).
- Bertanggung jawab atas keputusan pengaturan lalu lintas.

3. Kompeten

- Petugas memahami aturan lalu lintas dan perundang-undangan terbaru.
- Meningkatkan kemampuan dalam pengaturan traffic, ATCS.
- Mengikuti pelatihan keselamatan transportasi.

4. Harmonis

- Saling menghormati antar pegawai dan instansi lain.
- Tidak membeda-bedakan masyarakat saat memberikan pelayanan.
- Menjaga komunikasi yang baik di lapangan.

5. Loyal

- Mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam penataan transportasi.
- Menjaga nama baik instansi.
- Siap bertugas saat dibutuhkan.

6. Adaptif

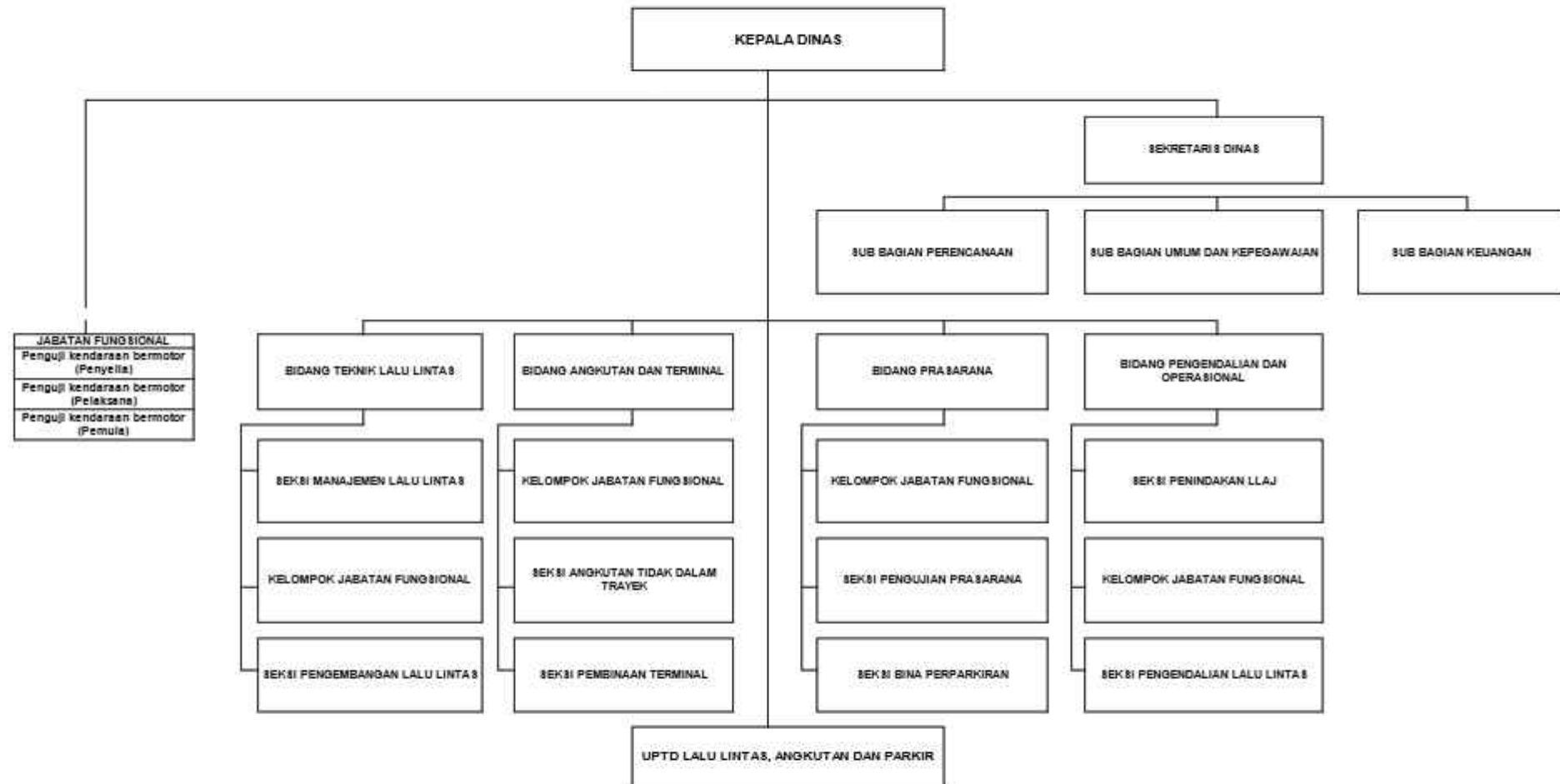
- Siap menggunakan sistem digital seperti aplikasi pengaduan.
- Cepat menyesuaikan pengaturan lalu lintas saat ada perubahan kondisi di lapangan.
- Terbuka terhadap inovasi transportasi

7. Kolaboratif

- Bekerja sama dengan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas.
- Bersinergi dengan masyarakat untuk menciptakan lalu lintas tertib.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pejabat Struktural. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu Sekretariat dengan tiga sub bagian, empat Bidang, dua belas UPTD Lalu Lintas Angkutan dan parkir dan jabatan fungsional dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Bekasi

SDM	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir						
		SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3
PNS	126	1	4	42	2	56	21	-
PPPK	923	2	13	642	51	215	-	-
Jumlah	1058	3	17	684	53	271	21	0

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dalam pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga didukung sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Kota Bekasi

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	36	✓	-	-
2	Kendaraan Roda 2	146	145 Unit	-	1 Unit
3	Kendaraan Roda 6	5	✓	-	-
4	Note Book	4	✓	-	-
5	P.C Unit	136	126 Unit	10 unit	-
6	Alat Kantor Lainnya	71	✓	-	-
7	Mini Komputer	4	✓	-	-
8	Tablet PC	26	✓	-	-
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	107	✓	-	-
10	Alat Penghancur Kertas	5	1 Unit	-	4 unit
11	A.C Sentral	1	✓	-	-
12	A.C. Split	32	✓	-	-
13	A.C. Window	11	✓	-	-
14	Handy Talky (HT)	205	195 Unit	10 unit	-
15	Filing Cabinet Besi	45	✓	-	-
16	Filing Cabinet Kayu	2	✓	-	-
17	Bangku Tunggu	21	✓	-	-
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	129	✓	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon	102	✓	-	-
20	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	✓	-	-
21	Kursi Rapat	340	✓	-	-
22	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	5	✓	-	-
23	Kursi Tamu	12	9 Unit	-	3 Unit
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	107	✓	-	-
25	Ruang Arsip	1	✓	-	-
26	Lemari Kaca	2	✓	-	-
27	Lemari Penyimpan	4	✓	-	-
28	Meja 1/2 Biro	344	339 Unit	-	5 Unit
29	Meja Bundar	4	✓	-	-
30	Meja Kerja	6	✓	-	-
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	175	✓	-	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon	38	✓	-	-
33	Meja Rapat	22	21 Unit	-	1 Unit

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah

bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan pengembangan lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Angkutan Dan Sarana meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Prasarana meliputi prasarana transportasi, pengujian prasarana dan bina perpajakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Pengendalian dan Operasional meliputi penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas sertapengendalian lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya. Dan Di lingkungan Dinas Perhubungan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang terimplementasi pada era otonomi yang diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan

pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Secara umum permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi antara lain adalah tuntutan masyarakat terkait dengan penanganan kemacetan di Kota Bekasi, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang profesional dan transparan. Adapun peran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah melakukan pengaturan & manajemen lalu lintas, pengawasan dan penertiban parkir, pengembangan transportasi umum, perencanaan transportasi kota dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2025 terdiri dari:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

terdiri dari 7 kegiatan 24 sub kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub

yaitu:

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 3) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 4) Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
 - 5) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

g. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

1) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

I. Retribusi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2025 terdiri dari:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal
3. Retribusi terminal
4. Retribusi ijin trayek
5. Pendapatan denda retribusi

Secara umum layanan organisasi Dinas Perhubungan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

- a. **Perencanaan** yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.
- b. **Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.
- c. **Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
- d. **Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perhubungan yaitu:

1. Bidang Teknik Lalu Lintas, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan
2. Bidang Angkutan dan Terminal, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Bidang Prasarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana serta perawatan prasarana.
4. Bidang Pengendalian dan Operasional, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas serta pengendalian lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis.
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisien penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas Anggaran

C. Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 dirumuskan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu "Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari" dengan Sasaran "Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern" Berdasarkan RPJMD tersebut Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis, sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran jalan
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah :

1. Meningkatnya kelancaran lalu lintas.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan					
			1 Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio	1,41%	1,43%	1,45%	2,20%	2,25%
			2 Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	0,28	0,27	0,26	0,25	,024
			3 Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	15%	15,7%	16,5%	17,2%	18%
			4 Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum	32%	43%	52%	64%	73%

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan 2025 – 2029

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapun perbandingan perubahan indikator utama kinerja pada RPD 2024-2026 dan setelah RPJMD 2025-2029 yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Tahun 2025 (RPD 2024-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas	1 Persentase Peningkatan titik kemacetan yang tertangani	Tingkat kelancaran lalu lintas yang belum tertangani secara maksimal bahkan bertambah akibat dari pertumbuhan kota	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani <i>dibagi</i> jumlah titik kemacetan <i>dikali</i> 100%	83%
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1 Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan dikali 100%	9,5%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1 Nilai Evaluasi AKIP	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.	LHE SAKIP oleh APIP berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	78,60

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Bekasi, 2025

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1 Persentase Penurunan Rata-rata V/C Rasio	V/C Rasio adalah singkatan dari Volume to Capacity Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas yang melewati suatu ruas jalan dengan kapasitas maksimum ruas jalan tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu jalan atau simpang.	Rata-rata V/C Ratio jalan kota bekasi tahun N-1 dikurang rata rata V/C Ratio jalan kota bekasi tahun (N1)dibagi Rata-rata V/C Ratio jalan kota bekasi tahun N-1 dikali 100%	1,41%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	TARGET TAHUN 2025
		2 Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Upaya untuk menurunkan risiko kecelakaan, cedera, dan kematian di jalan raya dilakukan melalui serangkaian tindakan preventif, perbaikan fasilitas jalan, penegakan aturan lalu lintas, edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi terkini.	Jumlah kecelakaan berat dikota bekasi / jumlah kendaraan di kota bekasi x 10.000	0,28
		3 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indikator ini mengukur jumlah terminal tipe A, B, atau C yang telah selesai dibangun baru dan halte atau direhabilitasi pada tahun berjalan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Satuan yang digunakan adalah unit terminal. Pengukuran dilakukan dengan menghitung total jumlah terminal yang penyelesaiannya dibuktikan melalui laporan fisik pekerjaan dan dokumen administrasi serah terima pekerjaan.	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dibagi jumlah kebutuhan saran dan prasarana perhubungan dikali 100 persen	15%
		4 Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum	Indikator Utama Kinerja Pelayanan Angkutan Umum 1.Ketersediaan Layanan (Availability) 2. Keandalan (Reliability) 3.Kenyamanan (Comfort) 4.Keamanan dan 5. Keselamatan (Safety & Security) 6.Aksesibilitas (Accessibility) 7.Keterjangkauan (Affordability) 8.Kepuasan Pengguna (Customer Satisfaction) Pnp (Penumpang) = Banyaknya jumlah kapasitas angkutan umum massal yang disediakan.	Jumlah armada yang beroperasi dibagi ketersediaan armada dibagi dengan dikali 100%	32%

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Bekasi, 2025

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Perhubungan Kota Bekasi membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pemilihan perjanjian kinerja tersebut sesuai dengan penentuan sasaran strategis dan indikator telah ditetapkan pada RPJMD yang telah dirumuskan agar kinerja Dinas lebih terukur pada setiap bidangnya, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPD 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	%	83
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	%	9,5
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78,60

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1	Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio	%	1,41
		2	Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	Rasio	0,28
		3	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	%	15
		4	Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum	%	32

Sumber : Perkin Esselon II Dinas Perhubungan, 2025

Adapun Alokasi Anggaran murni pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.000.000	-	14.240.000	4.260.000	54.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.138.354.000	10.950.426.400	12.035.327.400	9.030.458.875	10.122.141.325	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	832.655.000	150.000.000	100.000.000	582.655.000	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.972.081.000	635.276.000	352.684.500	922.165.400	61.955.100	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	902.350.000	902.350.000	-	-	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.124.587.920	8.508.295.070	12.280.292.070	12.280.292.070	16.055.708.710	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.984.459.150	131.600.000	863.050.000	739.808.900	250.000.250	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	93.981.067.760	21.175.107.940	25.943.826.740	25.788.289.440	21.073.843.640	
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	750.000.000	-	30.000.000	520.000.000	200.000.000	
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	993.143.200	-	793.142.990	200.000.000	210	
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.126.470.753	5.190.000	1.088.004.800	527.634.000	505.641.953	
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.793.135.487	399.485.000	480.184.240	1.820.816.200	92.650.047	
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	200.000.000	-	-	-	200.000.000	

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.601.500.000	1.561.500.000	1.940.000.000	1.740.000.000	2.360.000.000	

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dishub Kota Bekasi, 2025

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil dicapai sepenuhnya pada tahun 2025.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan RPD 2024-2026, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025
(RPD 2024-2026)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
A. Sasaran 1 Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas				
1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	83%	83%	100
B. Sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan				
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi	9,5%	7,3%	77
C. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja				
1	Nilai Evaluasi AKIP	78,6	80,28	102

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Bekasi, 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani dengan capaian kinerja sebesar 100 persen (tercapai) dengan realisasi penanganan 6 titik kemacetan pada Simpang Rawa Bugel, Simpang Komsen, Simpang Tol Jatiasih, Simpang Telkom, Simpang PGP, Bawah Fly Over Kranji (Jl. Pangeran Jayakarta). Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas telah tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu : Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi dengan capaian kinerja 77 persen (belum tercapai), maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum tercapai sepenuhnya.

Dan untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 102 persen. Nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh Dinas Perhubungan sebesar 80,28 sedangkan target adalah 78,60. Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja telah tercapai.

Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan RPJMD 2025-2029, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
A. Sasaran : Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas				
1	Persentase Penurunan Rata-rata V/C Rasio	1,41%	19,8%	1404
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,28	0,28	100
3	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	15%	18%	120
4	Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum	32%	32%	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Bekasi, 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025-2029. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas, diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu:

1. Penurunan rata-rata V/C Rasio dengan realisasi sebesar 19,8 persen dan capaian kinerja sebesar 1404 persen (tercapai).
2. Indikator kedua adalah Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan dengan realisasi sebesar 0,28 dan capaian kinerja 100 persen (tercapai).

- Indikator ketiga adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan realisasi sebesar 18 persen dan capaian kinerja 120 persen (tercapai).
- Indikator keempat adalah Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum dengan realisasi sebesar 32 persen dan capaian kinerja 100 persen (tercapai).

Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas telah tercapai.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

1. Indikator Sasaran Persentase Penurunan Rata-rata V/C Rasio



Sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pembangunan LRT/Light Rail Transit, pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api, proyek pemasangan pipa pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jalan Hasibuan Kecamatan Bekasi dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kota Bekasi. Kemacetan lalu lintas masih menjadi isu strategis.

V/C Rasio (Volume per Capacity Ratio) merupakan indikator kinerja utama untuk menilai Tingkat kepadatan lalu lintas pada ruas jalan.

Penurunan rata-rata V/C Rasio menunjukan bahwa arus lalu lintas semakin mendekati kondisi ideal dan kapasitas jalan dimanfaatkan secara lebih efisien. Berbagai intervensi telah dilakukan, antara lain manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan simpang, optimalisasi fungsi rambu dan marka, serta pengendalian titik-titik rawan kemacetan.

Penanganan kemacetan merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi dan lalu lintas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai pelaksanaan dari Perpres tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 551.1/944-Setda.TU Tentang Penataan Ijin Trayek, Titik Kemacetan, Penempatan Petugas Lalu Lintas di Kota Bekasi.

Indikator ini mendukung keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Kedua RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern” sejalan dengan Tujuan “Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari”.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Rata-Rata V/C Rasio

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio	Persen	1,41%	19,8%	1410%

Sumber : Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 dari Indikator Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio tahun 2025 sebesar 1,41 persen, sementara realisasi mencapai 20 persen maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio sebesar 1410 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 sudah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah (V/C Rasio Tahun (n-1) dikurang V/C Rasio Tahun n dibagi V/C Rasio tahun (n-1) dikali 100%.

V/C Rasio pada tahun 2024 adalah 0,711 sedangkan V/C Rasio pada tahun 2025 sebesar 0,570 sehingga persentase penurunannya sebesar 19,8 persen, sedangkan target pada tahun 2025 adalah 1,41 persen.

Dalam penentuan target penurunan rata-rata V/C Rasio didapatkan

dari hasil perhitungan baseline tiga tahun terakhir dan didapatkan target untuk tahun 2025 sebesar 1,41 persen dengan capaian sebesar 1410 persen. Hal tersebut dapat disebabkan karena pada rentang tahun 2022-2024 terdapat beberapa kondisi dimana berdampak terhadap kemacetan di Kota Bekasi seperti proyek nasional SPAM Jatiluhur, pembangunan LRT sehingga perhitungan V/C Rasio sangat tinggi. Sedangkan pada tahun 2025 proyek tersebut sudah selesai sehingga hasil perhitungan V/C Rasio pada tahun 2025 yang dibantu oleh konsultan didapatkan hasilnya sangat kecil. Sehingga penurunan V/C Rasio sangat tinggi dan didapatkan capaian sebesar 1410 persen. Maka dari itu Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi target indikator sasaran pada Renstra di tahun ketiga renstra.

Untuk melihat perbandingan capaian persentase penurunan rata-rata V/C rasio Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase
penurunan rata-rata V/C Rasio antara Tahun 2024 dengan 2025

N O	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
A.	Sasaran Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas				
1	Persentase penurunan rata-rata V/C rasio	-	19,8%	-	1410%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 realisasi Persentase penurunan rata-rata V/C rasio sejumlah 0 persen dengan capaian sebesar 0 persen dan pada tahun 2025 realisasi Persentase penurunan rata-rata V/C rasio sejumlah 19,8 persen dengan capaian sebesar 1410 persen.

Data capaian Tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan ini merupakan indikator baru yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan yang didampingi oleh konsultan transportasi yang telah tertuang pada Renstra 2025-2029 sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya penanganan titik-titik kemacetan secara berkelanjutan melalui pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan dan

optimalisasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta penambahan dan peningkatan kapasitas ruas jalan guna memperlancar arus lalu lintas.

- Selain itu Dinas Perhubungan juga rutin dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti satu arah ataupun contraflow pada titik kemacetan dalam kondisi *peek hour*.

Capaian indikator Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Penurunan Rata-Rata V/C Rasio Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Penurunan Rata-Rata V/C Rasio	
		2025	2029
Target	Persen	1,41	2,25
Realisasi	Persen	19,8	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio pada tahun 2025 sebesar 20 persen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 3,07 persen.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
1	Angkutan Jalan	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan Perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan Jalan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	72%	120%
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	30%	30%	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk realisasi Indikator Tersedianya fasilitas Perlengkapan jalan (rambu,

marka, dan guardrill) dan Jalan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota sejumlah 72% dengan capaian sebesar 120 persen dan realisasi tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL. Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota sejumlah 30% dengan capaian sebesar 100 persen. Maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah berhasil mencapai target Standar Nasional yang telah ditetapkan.

Pencapaian SPM yang melebihi 100 persen dikarenakan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri untuk kondisi sampai dengan tahun 2014 sedangkan pembaruan peraturan tersebut belum terbit sehingga terdapat beberapa indikator yang melebihi target capainnya.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase penurunan rata-rata V/C rasio dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	92.262.070.690	73.193.794.866	79%	100	79
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	92.262.070.690	73.193.794.866	79%	100	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio dimana pagu anggaran sebesar Rp.92.262.070.690 dengan realisasi sebesar Rp.73.193.794.866, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 79 persen. Maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebesar 79 persen. Adapun Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran Persentase

penurunan rata-rata V/C Rasio didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 563 petugas pengatur lalu lintas dan pegawai Bidang Pengendalian dan Operasional, 25 Pegawai Bidang Teknik Lalu Lintas dan 187 pegawai UPTD LLAP, 1 sistem simulasi pengendalian/pengaturan lalu lintas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, dapat diklasifikasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Kriteria Kinerja Keuangan

Pesentase kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

$$EFISIEN = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Persentase penurunan rata-rata V/C rasio Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Pemasangan fasilitas lalu lintas, Penempatan petugas pengatur lalu lintas. Adapun Eviden Kegiatan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Pengaturan Lalin Pada Simpang Kemang



Gambar 3.2 Pengaturan Lalin Pada Jl. Raya Pekayon



Gambar 3.3 Pemeliharaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas



2. Indikator Sasaran Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan



Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan digunakan untuk mengukur tingkat keselamatan lalu lintas. Penurunan rasio fatalitas menunjukkan peningkatan kualitas keselamatan jalan melalui berbagai program, seperti peningkatan fasilitas keselamatan jalan, penataan lokasi rawan kecelakaan, serta edukasi dan penegakan disiplin berlalu lintas. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan lalu lintas telah memberikan dampak positif dalam menurunkan risiko kecelakaan fatal. Sinergi antara perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana keselamatan, dan kesadaran pengguna jalan berperan penting dalam pencapaian ini kedepan, diperlukan konsistensi pengawasan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan guna menjaga tren penurunan fatalitas.

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan transportasi dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan transportasi diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur transportasi meliputi:

- ada muatan yang diangkut
- tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya
- ada jalanan yang dapat dilalui
- ada terminal asal dan terminal tujuan
- sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Moda transportasi darat kemudian lebih dikenal dengan istilah Lalu Lintas Angkutan Jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Rasio	0,28	0,28	100

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 dari Indikator Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan tahun 2025 sebesar 0,28 sementara realisasi mencapai 0,28 maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 sudah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah jumlah kecelakaan berat dikota Bekasi dibagi jumlah kendaraan dikota Bekasi dikali 10.000.

Berdasarkan data Pusiknas Polri Kecelakaan berat dikota Bekasi tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 52 menjadi 42 dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.514.124 menurut BPS Jawa Barat sehingga realisasi didapatkan sebesar 0,28 dengan capaian 100 persen.

Untuk melihat perbandingan capaian Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan antara Tahun 2024 dengan 2025

N o	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
A.	Sasaran Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas				
1	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	-	0,28	-	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 realisasi Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan sejumlah 0 persen dengan capaian sebesar 0 persen dan pada tahun 2025 realisasi Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan sejumlah 0,28 dengan capaian sebesar 100 persen.

Data capaian Tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan ini merupakan indikator baru yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan yang didampingi oleh konsultan transportasi yang telah tertuang pada Renstra 2025-2029 sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan penambahan serta pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, PJU serta optimalisasi APILL.
2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang lebih baik dengan pengaturan lalu lintas serta penanganan titik rawan kecelakaan.
3. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan operasi gabungan dengan jajaran samping guna meningkatkan kesadaran dan disiplin pengguna jalan.

Capaian indikator Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Akumulasi Realisasi Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	
		2025	2029
Target	Rasio	0,28	0,24
Realisasi	Rasio	0,28	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan pada tahun 2025 sebesar 0,28 dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2029 sebesar 0,24.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian

sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.734.146.487	2.518.997.324	92%	100	92
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.734.146.487	2.518.997.324	92%	100	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan dimana pagu anggaran sebesar Rp.2.734.146.487 dengan realisasi sebesar Rp.2.518.997.324, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 92 persen. Maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan kurang efisien dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebesar 92 persen. Adapun Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 563 petugas pengatur lalu lintas dan pegawai Bidang Pengendalian dan Operasional, 25 Pegawai Bidang Teknik Lalu Lintas dan 187 pegawai UPTD LLAP, 1 sistem simulasi pengendalian/pengaturan lalu lintas.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Pelaksanaan Operasi Gabungan, Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Adapun Eviden Kegiatan sebagai berikut :

Gambar 3.4 Pelaksanaan Operasi Gabungan



Gambar 3.5 Pelaksanaan MRL di Jalan Wibawa Mukti



3. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan



Sarana dan Prasarana lalu lintas merupakan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Dalam hal untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi.

Indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana perhubungan dalam mendukung kelancaran, keselamatan, dan keterpaduan sistem transportasi daerah. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), halte, terminal, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan kemacetan lalu lintas serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Persen	15	18	118

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 dari Indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan tahun 2025 sebesar 15 persen, sementara realisasi mencapai 18 persen maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan sebesar 118 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 telah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan dikali 100 persen

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan antara Tahun 2024 dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
A.	Meningkatnya kelancaran lalu lintas				
1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	-	18	-	118

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 realisasi Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sejumlah 0 persen dengan capaian sebesar 0 persen dan pada tahun 2025 realisasi Persentase peningkatan sarana dan prasarana sejumlah 18 dengan capaian sebesar 118 persen.

Data capaian Tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan ini merupakan indikator baru yang telah ditetapkan Dinas Perhungan yang didampingi oleh konsultan transportasi yang telah tertuang pada Renstra 2025-2029 sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Adapun faktor keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Telah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pada tahun 2025 sesuai dengan yang ditargetkan yaitu Halte, Terminal, Gedung PKB, APILL, Rambu, Marka, dan PJU.

Data capaian realisasi target indikator ini bersumber dari data sarana dan prasarana pendukung transportasi tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Data Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Jenis sarana dan prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana kondisi rusak sebelum 2025	2025	
			Target yang dipelihara	Realisasi
1	Halte	8	4	0
2	Terminal	2	2	2
3	Gedung Kantor	2	2	2

No	Jenis sarana dan prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana kondisi rusak sebelum 2025	2025	
			Target yang dipelihara	Realisasi
4	APILL	4	4	0
5	Rambu	150	23	123
6	Marka	3.500	525	500
7	PJU	13.000	1.950	2.337
Total		16.666	2.510	2.964
%			15%	18%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Tabel 3.16
Data Halte, Terminal Tahun 2025

No	Fasilitas Pendukung Transportasi	Target	Realisasi
1	Halte Transpatriot	17	17
2	Halte Pemerintah Kota	39	39
3	Terminal	2 Terminal	2 Terminal

Sumber : Bidang Angkutan dan Terminal, 2025

Adapun untuk lokasi halte Transpatriot sebagai berikut :

Tabel 3.17
Lokasi Halte Transpatriot Tahun 2025

NO	LOKASI HALTE
1	Halte Bulak Kapal
2	Halte Tol Bekasi Timur
3	Halte RS Bella
4	Halte Terminal Induk
5	Halte Revo Town
6	Halte BCP
7	Halte GOR
8	Halte Harapan Indah I
9	Halte Harapan Indah II
10	Halte Pemda
11	Halte Summarecon I
12	Halte Summarecon II
13	Halte Blue Plaza
14	Halte Grand Mall

NO	LOKASI HALTE
15	Halte Stasiun Kranji
16	Halte Rawa Panjang
17	Halte Islamic Center

Sumber : Bidang Prasarana, 2025

Adapun untuk data rambu dan marka yang berfungsi baik sebagai berikut :

Tabel 3.18
Data Rambu dan Marka 2023-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2023	2024	2025
A	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan				
1	Rambu Standar UK.60	unit	104	42	86
2	Rambu Standar berikut Papan Tambahan	set	110	50	65
3	Pengadaan Rambu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	unit	10	7	6
4	Pengadaan Rambu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Kantilever	unit	2	-	2
5	Pengadaan Rambu Tipe F	unit	2	-	-
6	Pengadaan Papan Indentitas Jalan Perkotaan	unit	25	30	35
	Jumlah		253	129	194
B	Pengadaaan dan Pemasangan Marka				
1	Pengadaan Marka Jalan	m2	1.764,47	1.558,00	1.929,00
C	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas				
1	Pengadaan dan Pemasangan APILL	simpang	-	1	-
2	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	lokasi	1	-	3
D	Penyediaan Jalur Keselamatan Pesepeda				
1	Penyediaan Jalur Keselamatan Pesepeda				-
E	Penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)				
1	Peyediaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) KLA	lokasi	8	4	2
F	Penyediaan Kawasan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				
1	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	lokasi	2	4	4
G	Pengadaan Alat Pengendali Pengatur Lalu Lintas				
1	Pengadaan MCB Beton	unit	47	-	-
2	Pengadaan Water Barrier	unit	103	-	20
3	Pengadaan Road Stoad	unit	1.113	-	529
4	Pengadaan Road Stoad Solar Cell	unit	500	-	595

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2023	2024	2025
7	Pengadaan Traffic Cone	unit	219	-	50
8	Pengadaan Relling Portable	unit	35	-	-
9	Pengadaan Speed Bamb	m	340	324	162
10	Pengadaan Rambu Portable	unit	100	26	-
11	Pengadaan Barrier Gate	set	1	-	-
12	Pengadaan Cermin Cembung Tikungan Uk. 100	unit	51	103	46
13	Pengadaan Cermin Cembung Tikungan Uk. 80	unit	75	41	73
	Jumlah		2.584	494	1475
H	PELAKSANAAN MANAGEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA				
	Peningkatan Sistem Alat Traffic Counting Portable	unit	-	1	-
	Pengadana dan Pemasangan IP Kamera PTZ + Audio Annouser	set	-	1	-
I	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN				
1	Daun Rambu Lalu Lintas Dijalan	unit	70	30	50
2	Papan Tambahan Rambu Lalu Lintas Di jalan	unit	71	28	51
3	Daun / Panel RPPJ Uk. 160 x 180	unit	10	12	12
4	Pemasangan Marka Jalan (Thermoplastic)	m2	536	930	500
5	Pemeliharaan Perangkat Traffic Light	paket	1	1	1
6	Pemeliharaan Warning Light	set	1	-	-
7	Pemeliharaan Link Komunikasi Fiber Optik ATCS	paket	-	1	1
	Relokasi Link Komunikasi Fiber Optik Udara	paket			1
8	Pemeliharaan Alat Counter	set	1	-	-

Sumber : Bidang Teknik Lalu Lintas, 2025

Pencapaian indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan pada tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian Program yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.3.19
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja
1	Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	Persen	51,72	51,72	100

Sumber : Rencana Strategis Dishub 2025-2029

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan sudah tercapai dengan baik.

Capaian indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	
		2025	2029
Target	Persen	15	18
Realisasi	Persen	18	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2025 sebesar 15 persen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2029 sebesar 18 persen.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional sesuai dengan PM. 81 Tahun 2011, sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
1	Angkutan Jalan	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	100%
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	4,00%	10%
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan Pengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang Kendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	1715%	2858%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	50%	100%
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	100%	100%
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100%	100%	100%
		Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	110%	110%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan KotBerda Bekasi telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk realisasi Indikator Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota sejumlah 82% dengan capaian sebesar 109 persen, realisasi Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota sejumlah 75% dengan capaian sebesar 125 persen, realisasi Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sejumlah 4% dengan capaian sebesar 10 persen, realisasi Tersedianya unit pengujian kendaraan Pengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang Kendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji sejumlah 1715%

dengan capaian sebesar 2858 persen, realisasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota sejumlah 110% dengan capaian sebesar 110 persen. Maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagian besar telah berhasil mencapai target Standar Nasional yang telah ditetapkan.

Pencapaian SPM yang melebihi 100 persen dikarenakan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri untuk kondisi sampai dengan tahun 2014 sedangkan pembaruan peraturan tersebut belum terbit sehingga terdapat beberapa indikator yang melebihi target capainnya.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.879.367.153	2.408.764.129	98	100	98
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	793.143.200	782.582.850	99	100	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	550.000.000	547.060.479	99	100	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.436.223.953	981.120.800	94	100	

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	98.000.000	98	100	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 4 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan dimana pagu anggaran sebesar Rp.2.879.367.153,- serta realisasi anggaran sebesar Rp.2.408.764.129,-, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 98 persen. Maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan kurang efisien dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebesar 98 persen. Adapun Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 162 pegawai angkutan dan terminal, prasarana, pengujian kendaraan bermotor, 1 sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Uji KIR Roda empat, Pembangunan Smart Halte Transpatriot, Pengoperasian Bus Transpatriot. Adapun Eviden Kegiatan sebagai berikut :

Gambar 3.6 Uji KIR Roda 4



Gambar 3.7 Pembangunan Smart Halte Transpatriot



4. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum



Indikator Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan dan kesiapan armada angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator ini menggambarkan proporsi jumlah armada angkutan umum yang beroperasi dibandingkan dengan total armada yang tersedia, sebagai cerminan tingkat pemenuhan pelayanan transportasi publik di daerah. Peningkatan indikator ini diharapkan dapat mendorong peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, serta kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat.

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum	Persen	32%	32%	100%

Sumber : Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 dari Indikator Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum tahun 2025 sebesar 32 persen, sementara realisasi mencapai 32 persen maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum sebesar 100 persen,

dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 sudah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah $(\text{Jumlah Armada yang Beroperasi} \div \text{Jumlah Armada yang Ada}) \times 100\%$.

Jumlah armada yang tersedia sebanyak 44 bus sedangkan jumlah armada yang beroperasi sebanyak 14 bus, sehingga realisasi didapatkan sebesar 32 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan pelayanan angkutan umum telah mencapai target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa proporsi armada yang beroperasi telah sesuai dengan kapasitas pelayanan yang direncanakan pada periode berjalan, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan operasional angkutan umum oleh perangkat daerah bersama dengan operator angkutan. Capaian kinerja yang sesuai target ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program peningkatan pelayanan angkutan umum telah dilaksanakan secara konsisten. Armada yang beroperasi telah mampu melayani kebutuhan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi dan permintaan pelayanan pada wilayah layanan yang tersedia.

Sedangkan sisa armada bus yang tidak beroperasi sebanyak 30 bus masih menunggu pembukaan kembali trayek bus harapan indah-terminal bekasi yang akan berjalan pada tahun 2026.

Meskipun indikator telah mencapai target, masih terdapat ruang untuk peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum melalui optimalisasi pemanfaatan armada yang belum beroperasi. Upaya peningkatan kualitas layanan, penataan trayek, serta dukungan sarana pendukung diharapkan dapat meningkatkan tingkat operasional armada pada periode berikutnya.

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum antara Tahun 2024 dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum	-	32%	-	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 realisasi persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum sejumlah 0 persen dengan capaian sebesar 0 persen dan pada tahun 2025 realisasi persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum sejumlah 32% dengan capaian sebesar 100 persen.

Data capaian Tahun 2024 tidak tersedia dikarenakan terdapat perubahan indikator sasaran pada Dinas perhubungan yang telah tertuang pada Renstra 2025-2029 sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Adapun faktor keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Jika dilihat serapan anggaran dan realisasi kegiatannya sangat kecil dikarenakan subsidi transpatriot tidak dapat terserap karena pihak BUMD yang masih dalam restrukturisasi. Sedangkan pada tahun 2025 Kota Bekasi mendapatkan bantuan Bus Kita dan subsidi selama 1 tahun yang sebanyak 14 bus dari Kementrian Perhubungan, sehingga capaian indikator sasaran Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum tercapai 100 persen dengan anggaran yang sangat efisien. Didapatkan data total jumlah penumpang yang menggunakan bus kita pada tahun 2025 sebanyak 1.118.351 penumpang.

Pencapaian indikator Persentase peningkatan pemenuhan layanan angkutan umum tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian Program yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25
Indikator Capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja
1	Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi	Persen	32	32	100

Sumber : Rencana Strategis Dishub 2025-2029

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum maka akan berpengaruh pada tingkat ketercapaian Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi. Capaian indikator Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Peningkatan
Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum	
		2025	2029
Target	Persen	32	73
Realisasi	Persen	32	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2025 sebesar 32 persen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2029 sebesar 73 persen.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional sesuai dengan PM. 81 Tahun 2011, sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
1	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.	75%	82%	109%
			Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	75%	125%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk realisasi Indikator Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota sejumlah 82 persen dengan capaian sebesar 109 persen dan realisasi Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek

yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota sejumlah 75 persen dengan capaian sebesar 125 persen. Maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah berhasil mencapai target Standar Nasional yang telah ditetapkan.

Pencapaian SPM yang melebihi 100 persen dikarenakan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri untuk kondisi sampai dengan tahun 2014 sedangkan pembaruan peraturan tersebut belum terbit sehingga terdapat beberapa indikator yang melebihi target capainnya.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.752.200.000	389.437.062	14	18	14
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.752.200.000	389.437.062	14	18	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum dimana pagu anggaran sebesar Rp.2.752.200.000 dengan realisasi sebesar Rp.389.437.062, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 14 persen dengan capaian sebesar 18 persen. Jika dilihat serapan anggaran dan realisasinya sangat kecil dikarenakan subsidi transpatriot tidak dapat terserap karena pihak BUMD yang masih dalam restrukturisasi. Sedangkan pada tahun 2025 Kota Bekasi mendapatkan bantuan Bus Kita dan subsidi selama 1 tahun yang sebanyak 14 bus dari Kementrian Perhubungan, sehingga capaian indikator sasaran Persentase

peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum tercapai 100 persen dengan anggaran yang sangat efisien. Didapatkan data total jumlah penumpang yang menggunakan bus kita pada tahun 2025 sebanyak 1.118.351 penumpang.

Bus yang beroperasi pada tahun 2025 sebanyak 14 bus dan total seluruh armada yang tersedia sebanyak 44 bus.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 563 petugas pengatur lalu lintas dan pegawai Bidang Pengendalian dan Operasional, 25 Pegawai Bidang Teknik Lalu Lintas dan 187 pegawai UPTD LLAP, 1 sistem simulasi pengendalian/pengaturan lalu lintas.

Gambar 3.6 Pengoperasian Bus Kita



3.2.1 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dalam hal ini Bidang Perhubungan turut berperan aktif dalam mendukung Reformasi Birokrasi nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi, serta optimalisasi penggunaan anggaran guna meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kualitas layanan perhubungan.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data eksisting pegawai per Desember 2025, Dinas Perhubungan Kota Bekasi didukung oleh 1058 orang pegawai, yang terdiri atas 126 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 923 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Efisiensi petugas lapangan Dinas Perhubungan dihitung berdasarkan kebutuhan rata-rata dua petugas pada setiap titik pengaturan lalu lintas. Dengan 90 titik pengaturan, dibutuhkan 180 petugas per shift. Sementara itu, jumlah petugas lapangan yang tersedia sebanyak 563 orang yang terbagi dalam dua shift atau sekitar 282 petugas per shift. Dengan demikian, tingkat efisiensi petugas lapangan mencapai 63,83%, yang menunjukkan bahwa jumlah petugas lapangan telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengaturan lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah berhasil melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas layanan pada bidang perhubungan.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Hal ini mencakup upaya meminimalkan pemborosan, baik berupa pengeluaran yang tidak diperlukan maupun alokasi sumber daya yang kurang tepat. Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga dengan pemanfaatan anggaran secara strategis guna menghasilkan dampak yang maksimal.

Dalam rangka mencapai target sasaran Tahun 2025, Dinas

Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.189.449.069.816 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Banprov. Berdasarkan data realisasi keuangan Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.169.104.844.212 atau sebesar 86,62% dari total anggaran Tahun 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.25.344.225.604, atau sebesar 13,38%.

c. Analisis Efisiensi Mesin / Peralatan

Efisiensi mesin atau peralatan merupakan perbandingan antara input dan output yang dicapai secara optimal. Efisiensi mesin yang baik dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, serta meningkatkan kualitas hasil kerja.

Berdasarkan data inventaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki aset tetap sebanyak 2.153 unit dengan rentang pengadaan dari tahun 2003 hingga 2025. Adapun kondisi aset tetap tersebut terdiri atas 2.119 unit dalam kondisi baik, 20 unit dalam kondisi rusak ringan, dan 14 unit dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan efisiensi mesin atau peralatan melalui pemeliharaan aset tetap secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah aset tetap dalam kondisi baik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset tetap dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Pemeliharaan aset tetap yang optimal tersebut secara tidak langsung berkorelasi dengan peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, serta peningkatan kualitas layanan.

d. Analisis Efisiensi Material / Bahan

Efisiensi material atau bahan merupakan upaya untuk menghasilkan produk atau layanan dengan menggunakan bahan baku seminimal mungkin. Dalam rangka meningkatkan efisiensi material Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor. Layanan tersebut merupakan aplikasi berbasis android E-KIR yang memudahkan masyarakat untuk mendaftar uji kendaraan bermotor secara elektronik sehingga penggunaan kertas untuk pendaftaran dan antrian dapat diminimalisir.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah

melakukan efisiensi material atau bahan baku melalui pemanfaatan produk layanan berbasis elektronik.

e. Analisis Efisiensi Metode

Efisiensi metode merupakan cara kerja atau proses untuk memaksimalkan hasil suatu pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik berupa dana, tenaga, maupun waktu. Dalam upaya meningkatkan efisiensi metode yang digunakan, Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pengembangan terhadap pelayanan perhubungan yang telah menggunakan aplikasi E-KIR yang berbasis android. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan proses administrasi yang sebelumnya memerlukan banyak waktu, bahan, dan sumber daya manusia, serta dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi didukung 2 (dua) program dan 14 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 kegiatan diantaranya :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari 7 kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
			Kinerja (%)	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	88.821.285.486	99,28	85.227.106.022
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	73.000.000	100	57.058.000
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	54.443.724.000	100	52.310.120.214
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	964.007.466	100	956.200.325
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.585.408.802	100	1.530.777.055
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.386.945.034	100	2.355.982.380
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	27.359.431.034	100	26.359.287.450
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.008.769.150	95	1.657.680.598
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100	100.627.784.330	88,28	78.877.738.190
8	Persentase Penurunan Rata-rata V/C Ratio	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	92.262.070.690	100	73.193.794.866
9	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	2.734.146.487	100	2.518.997.324
10	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	550.000.000	100	547.060.479
11		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	793.143.200	100	782.582.850
12		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	1.436.223.953	100	1.347.865.609
13		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100.000.000	100	98.000.000
14	Persentase Peningkatan Pemenuhan pelayanan angkutan umum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	2.752.200.000	18	389.437.062
TOTAL PENUNJANG + TOTAL URUSAN			100	189.449.069.816	94	164.104.844.212

3.3. Realisasi Anggaran

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Penunjang Urusan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp.88.821.285.486,00 dengan realisasi sebesar Rp.85.227.106.022,00 sedangkan jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Penyelenggaraan LLAJ yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp.100.627.784.330,00 dengan realisasi sebesar Rp.78.877.738.190,00 yang bersumber dari PAD, Banprov.

Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan		Realisasi	%	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.000.000	73.000.000	57.058.000	78%	Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.138.354.000	54.443.724.000	52.310.120.214	96%	Kurang efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	832.655.000	964.007.466	956.200.325	99%	Kurang efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.972.081.000	1.585.408.802	1.530.777.055	97%	Kurang efisien
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	902.350.000	2.386.945.034	2.355.982.380	99%	Kurang efisien
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.124.587.920	27.359.431.034	26.359.287.450	96%	Kurang efisien
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.984.459.150	2.008.769.150	1.657.680.598	83%	Cukup efisien
TOTAL PENUNJANG		97.027.487.070	88.821.285.486	85.227.106.022	96%	Kurang efisien
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	93.981.067.760	92.262.070.690	73.193.794.866	79%	Efisien
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	750.000.000	550.000.000	547.060.479	99%	Kurang efisien
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	993.143.200	793.143.200	782.582.850	99%	Cukup efisien
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.126.470.753	1.436.223.953	1.347.865.609	94%	Sangat efisien
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.793.135.487	2.734.146.487	2.518.997.324	92%	Kurang efisien

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan		Realisasi	%	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	200.000.000	-	-	-	-
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.601.500.000	2.752.200.000	389.437.062	14%	Sangat efisien
15	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000	98.000.000	98%	Kurang efisien
TOTAL URUSAN		108.445.317.200	100.627.784.330	78.877.738.190	78%	Efisien
TOTAL PENUNJANG + TOTAL URUSAN		205.472.804.270	189.449.069.816	164.104.844.212	87%	Cukup efisien

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dishub Kota Bekasi, 2025

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebesar 95%, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 87%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisien serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp.189.449.069.816,00,- dan terealisasi sebesar Rp.164.104.844.212,00,- dari pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada anggaran perubahan telah melaksanakan 2 program dengan 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 87% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki 1 (satu) sasaran strategis serta 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi IKU sebagian telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini terdapat target yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik.

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut di antaranya :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama sertifikasi untuk pegawai dalam hal sertifikasi andal lalin dan penguji pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan upaya percepatan dalam upaya restrukturisasi terhadap PT Mitra Patriot Kota Bekasi dan sampai pada saat ini belum dapat berjalan dikarenakan dasar hukum peralihan dari BUMD ke Swasta masih berlangsung pada tahap harmonisasi di Kanwil Provinsi agar dapat beroperasi kembali.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1	Persentase Penurunan rata-rata V/C Rasio	%	1,41
		2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Rasio	0,28
		3	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	15
		4	Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum	%	32

PENGUKURAN KINERJA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Tahun : 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5	6
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1	Persentase Penurunan rata-rata V/C Rasio	%	1,41	19,8	1410
		2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Rasio	0,28	0,28	100
		3	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	15	18	118
		4	Persentase Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Angkutan Umum	%	32	32	100